# Analisis Prospektif Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Provinsi Riau

Yulpi Yuandra1,Novia Dewi2, Rosnita3

1Jurusan Agribisnis, Fakultas Pascasarjana, Universitas Riau

2,3Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 – Indonesia,

Telp. 0761-63272

e-mail: yyuandra@gmail.com, dewinovia642@gmail.com, rosnitamag@gmail.com

***ABSTRAK***

*Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi kompetitif berkelanjutan bagi usahatani perkebunan kelapa sawit pola swadaya yang diuraikan sebagai berikut: (1) menganalisis atribut penentu pengembangan usahatani perkebunan kelapa sawit pola swadaya; (2) implikasi pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit pola swadaya. Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kampar, Rokan Hilir dan Rokan Hulu menggunakan metode survei dengan sampel 270 petani kelapa sawit yang ditentukan secara multi-stage sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan atribut penentu keberlanjutan paling berpengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dengan ketergantungan rendah terhadap keterkaitan antar faktor usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau terdiri dari prosedur perkebunan kelapa sawit yang menjadi pedoman bagi petani kelapa sawit kedepannya untuk memperbaiki tata kelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, pembinaan kelompok tani, adanya koperasi, perlunya pendamping bagi petani dalam usahatani kelapa sawit, transparansi yaitu kemudahan bagi petani mendapatkan informasi mengenai kebijakan kelapa sawit, peningkatan teknologi, kebijakan yang menguntungkan bagi petani, pengalaman dalam usahatani kelapa sawit, perlunya kemitraan dengan perusahaan, serta kepastian hukum. Selanjutnya atribut yang berpengaruh kecil namun memiliki ketergantungan tinggi terhadap keterkaitan antar faktor sehingga menjadi output dalam sistem yaitu bank mitra, pelayanan, sumber daya manusia, serta legalitas lahan. Implikasi pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau didasarkan pada variabel faktor-faktor yang terdapat pada Kuadran III. Adapun pengembangannya perlu adanya bank mitra bagi petani agar mempermudahkan modal dalam melaksanakan peremajaan, pemberian pelayanan dari pemerintah kepada petani berkaitan dengan masalah perizinan usahatani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan usahatani petani kelapa sawit swadaya (SDM) dan petani melengkapi legalitas lahan (SHM).*

***Kata kunci:*** *analisis prospektif, kelapa sawit, dan pola swadaya.*

**I. PENDAHULUAN**

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan bagi negara Indonesia dalam perdagangan internasional. Kelapa sawit termasuk dalam sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia dikarenakan daya saingnya yang kompetitif dalam perdagangan internasional. Daya saing tersebut didasarkan pada produktivitas per hektar kelapa sawit di Indonesia yang cukup tinggi. Di sisi lain, kelapa sawit juga merupakan tanaman yang cukup handal terhadap perubahan iklim sehingga membuat kemungkinan terjadinya gagal panen dapat diminimalisir. Kelapa sawit juga mengandung nutrisi yang tinggi dan baik bagi kesehatan manusia jika dilihat dari nilai kalori, vitamin, dan kadar kolesterolnya yang rendah. Jika dilihat dari fungsinya, kelapa sawit tidak hanya sebagai bahan pangan, kelapa sawit juga sebagai minyak nabati yang berpotensi untuk dijadikan bahan bakar biodiesel. Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan karena permintaan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan yang cukup besar. Tidak hanya didalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu sebagai negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui penanam modal asing maupun skala perkebunan rakyat.

Perkebunan kelapa sawit berdasarkan status pengusahaan terdiri dari perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Pada tahun 2017 Indonesia memiliki luas area perkebunan kelapa sawit sebesar 14 juta hektar yang terdiri dari perkebunan besar negara sebesar 710 ribu hektar, perkebunan besar swasta sebesar 7.1 juta hektar, dan perkebunan rakyat sebesar 5.6 juta hektar [1]. Perkebunan rakyat merupakan salah satu pengusahaan perkebunan yang memiliki luas area dan produksi kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, sehingga perkebunan rakyat berpengaruh besar pada produksi kelapa sawit Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Luas area dan produksi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Mengutip data dari DISBUN Riau luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 2.452.141 Ha. Sekitar 1.385.085 Ha merupakan perkebunan rakyat swadaya dan 1.067.056 Ha dikelola oleh perusahaan perkebunan nasional dan swasta dengan total produksi 7.456.298 ton [2].

Produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat jenis pola swadaya masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar negara, swasta dan plasma. Rendahnya produktivitas ini disebabkan pemilihan bibit yang tidak unggul, kurangnya pengetahuan mengenai pewawatan tanaman kelapa sawit, kurangnya pemupukan, usia tanaman yang sudah menua yang memerlukan peremajaan (*replanting*), kurangnya permodalan dan penguasaan teknologi, serta tidak adanya perencanaan penggantian tanaman yang teratur sesuai umur tanaman dan sebagainya [3].

Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya pendapatan usahatani yang diterima oleh petani pola sawit swadaya. Terlebih lagi dengan kondisi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berfluktuatif. Perkebunan kelapa sawit rakyat pola swadaya sebagian besar tidak menggunakan bibit unggul dengan pemeliharaan seadanya. Produktivitas TBS hanya sebesar 4,1–11 ton TBS/Ha/Th atau 23–44% dari potensialnya [4]. Rendahnya produktivitas TBS yang dihasilkan petani menjadikan pendapatan petani juga rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis pengembangan perkebunan kelapa sawit pola swadaya agar dapat menentukan strategi kompetitif yang berkelanjutan bagi usahatani perkebunan kelapa sawit pola swadaya yang dilihat dari atribut penentu pengembangan usahatani dan implikasi pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian adalah petani kelapa sawit yang berada di tiga Kabupaten Provinsi Riau yaitu Kampar, Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang dipilih menggunakan *multi-stage sampling*. Total sampel 270 petani kelapa sawit yang memiliki umur tanaman yang mendekati umur peremajaan.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung yang berpedoman pada daftar pertanyaan (kuesioner) meliputi karakteristik responden, luas lahan, pengalaman usahatani, jumlah biaya yang dikeluarkan selama satu tahun dan jumlah produksi dalam satu tahun. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau serta hasil-hasil kajian terkait.

Analisis data menggunakan analisis prospektif. Analisis prospektif digunakan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan [5]. Kegunaan analisis prospektif adalah untuk mempersiapkan tindakan strategis yang perlu dilakukan dan melihat apakah perubahan dibutuhkan di masa depan. Analisis prospektif merupakan pengembangan dari metoda *Delphi* yang menggunakan pendapat kelompok pakar yang memahami persoalan dengan benar untuk pengambilan keputusan dan strategi kebijakan. Tahapan analisis prospektif pada penelitian ini adalah sebagai berikut [5]:

1. Menentukan tujuan penelitian yang dikaji. Penelitian ini mengkaji pengembangan perkebunan kelapa sawit pola swadaya dan strategi kompetitif yang berkelanjutan bagi usahatani kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau.
2. Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan penelitian. Faktor-faktor pengembangan usahatani kelapa sawit pola swadaya berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor-faktor Pengembangan Usahatani Kelapa Sawit Pola Swadaya di Provinsi Riau.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Defenisi** |
| 1 | Pengetahuan dan keterampilan usahatani | Kemampuan yang dimiliki petani dalam menjalankan usahataninya yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, informasi usahatani, pelatihan dan lain-lain. |
| 2 | Teknologi | Salah satu syarat mutlak pembangunan pertanian yang dapat diterapkan dalam kegiatan budidaya. |
| 3 | Subsidi input produksi | Salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan yang masal seperti pemberian subsidi inpt produksi sesuai kebutuhan petani. |
| 4 | Investasi pihak swasta | Investasi yang dilakukan pihak swasta misalnya pengusaha dalam penyediaan faktor produksi. |
| 5 | Penyuluhan | Proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara cara berusahatani dan tercapainya pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya. Kegiatan dapat dilakukan melalui pendampingan kepada petani untuk menerapkan teknologi budidaya yang tepat. |
| 6 | Harga jual | Sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk (barang atauu jasa), atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. |
| 7 | Mitra dengan pedagang besar | Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh petani dengan pedagang besar dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. |
| 8 | Pemberdayaan kelembagaan petani | Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam mengembangkan usahatani yang lebih baik. |
| 9 | Kondisi lahan dan agroklimat | Ketersediaan lahan dan kondisi agroklimat yang mendukung usahatani. |
| 10 | Pengalaman usahatani | Gambaran mengenai lamanya petani melakukan usahatani yang dapat diukur berdasarkan jangka waaktu tertentu. |
| 11 | Tenaga kerja | Faktor penting dalam usahatani keluarga, khususnya tenaga kerja petani beserta anggota keluarganya. Ketersediaan tenaga kerja sangat mempengaruhi kegiatan usahatani. |
| 12 | Permintaan kelapa sawit | Sejumlah TBS kelapa sawit yang dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu. |
| 13 | Kontinuitas produksi | Produksi yang terus berlanjut atau berkesinambungan berdaasarkan periode periode tertentu. |
| 14 | Kemudahan dalam menjual | Kemudahan petani dalam mejangkau pedagang pengumpul ataupun eksportir dalam menjual hasil produksinya. |
| 15 | Penggunaan bibit unggul dan bermutu | Penggunaan bibit unggul dan bermutu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. |
| 16 | Manajemen usahatani | Pengelolaan secara efisien sumber sumber yang terdapat dalam keadaan terbatas seperti tenaga kerja, modal dan lain-lain. |
| 17 | Sarana prasarana usahatani | Segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya usahatani seperti faktor faktor produksi, peralatan pertanian dan lain-lain. |
| 18 | Dukungan perbankan | Dukungan perbankan berupa dana untuk kegiatan usahatani. |

1. Penilaian pengaruh langsung antar faktor. Semua faktor yang teridentifikasi pada (Tabel 1) akan dinilai pengaruh langsung antar faktor, dengan pedoman penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 [5].

Tabel 2. Pedoman Penilaian Analisis Prospektif.

|  |  |
| --- | --- |
| Skor | Pengaruh |
| 0 | Tidak ada pengaruh |
| 1 | Berpengaruh rendah |
| 2 | Berpengaruh sedang |
| 3 | Berpengaruh kuat |

Hasil perhitungan divisualisasikan dalam diagram pengaruh dan ketergantungan antar faktor yang dapat dilihat pada Gambar 1 [6].

Variabel penghubung

STAKES **(Kuadran II)**

Variabel terikat

OUTPUT

**(Kuadran III)**

Variabel autonomous

UNUSED **(Kuadran IV)**

Variabel penentu

INPUT

**(Kuadran I)**

Ketergantungan

Pengaruh

**Gambar 1.** Diagram pengaruh dan ketergantungan sistem.

Masing masing kuadran dalam diagram memiliki karakteristik faktor yang berbeda [6]:

1. **Kuadran I (kuadran kiri atas).**

Kuadran ini memuat faktor-faktor pada Tabel 1 yang memberikan pengaruh terhadap kinerja sistem dengan ketergantungan yang rendah terhadap keterkaitan antar faktor. Faktor pada kuadran ini merupakan faktor penentu atau penggerak (*driving variables*) yang termasuk dalam kategori faktor yang paling kuat dalam sistem.

1. **Kuadran II (kuadran kanan atas).**

Faktor-faktor pada Tabel 1 yang terdapat dalam kuadran ini merupakan kelompok faktor yang memberikan pengaruh dan ketergantungan yang tinggi (*leverage variables*). Faktor-faktor yang terdapat pada kuadran ini sebagian dianggap sebagai peubah yang kuat.

1. **Kuadran III (kuadran kanan bawah).**

Faktor pada Tabel 1 yang terdapat dalam kuadran ini menjadi output dalam sistem (*output variables*) yang memiliki pengaruh rendah terhadap kinerja sistem dan ketergatungan yang tinggi terhadap keterkaitan antar faktor. Faktor-faktor dalam kuadran ini akan menjadi sasaran pengembangan usahatani kelapa sawit di Provinsi Riau.

1. **Kuadran IV (kuadran kiri bawah)**

Faktor pada Tabel 1 yang terdapat dalam kuadran ini mempunyai pengaruh rendah terhadap kinerja sistem dan tingkat ketergantungan yang juga rendah (*marjinal variables*). Faktor ini bersifat bebas dalam sistem.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada usahatani perkebunan kelapa sawit pola swadaya yang berada di tiga Kabupaten Provinsi Riau yaitu Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir yang memiliki usia mendekati masa peremajaan terbanyak berada di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara mendalam dengan para pakar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit pola swadaya diantaranya yaitu: (1) transfaransi; (2) koperasi; (3) prosedur; (4) kelompok tani; (5) pendamping; (6) kebijakan; (7) kemitraan; (8) pengalaman; (9) teknologi; (10) kepastian hukum; (11) sosialisasi; (12) agroklimat; (13) pemasaran; (14) bank mitra; (15) pelayanan; (16) sumber daya manusia; dan (17) legalitas lahan.

Klasifikasi faktor penentu dipaparkan dalam 4 kuadran, yaitu: (1) kuadran I merupakan *input variables/driving variables* (variabel penentu); (2) kuadran II merupakan *relay variables* (variabel penghubung); (3) kuadran III merupakan *resulting variables/output variables* (variabel terikat); dan (4) kuadran IV merupakan *excluded variables* (variabel bebas). Sistem yang stabil ditunjukkan dengan sebaran atribut pada kuadran I (*driving variables*) dan pada kuadran III (*output variables*). Ketika sebaran faktor berada pada kuadran II dan kuadran IV maka sistem itu dinyatakan tidak stabil [5].

Penilaian pengaruh langsung antar faktor gabungan oleh pakar diolah dengan perangkat lunak analisis prospektif yang divisualisasikan dalam diagram pengaruh dan ketergantungan antar faktor yang dapat dilihat pada Gambar 2. Dari diagram tersebut diperoleh faktor-faktor kunci yang paling berpengaruh. Faktor yang menentukan tingkat keberlanjutan usahatani kelapa sawit muncul pada kuadran III setelah dianalisis menggunakan analisis prospektif sehingga matriks hubungan langsung dan tidak langsung dapat disusun dengan menempatkan pada masing-masing ordinat (x,y) yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.



**Gambar 2.** Diagram pengaruh dan ketergantungan antar faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usahatani kelapa sawit pola swadaya.

Kuadran kiri atas (kuadran I) merupakan faktor yang memberikan pengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dengan ketergantungan yang rendah terhadap keterkaitan antar faktor. Faktor-faktor yang terdapat dalam kuadran ini digunakan sebagai faktor penentu di dalam sistem yang dikaji yaitu penentu faktor keberlanjutan dalam usahatani kelapa sawit. Faktor tersebut terdiri atas prosedur, kelompok tani, koperasi, pendamping, transparansi, teknologi, kebijakan, pengalaman, kemitraan, dan kepastian hukum. Faktor-faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat keberlanjutan dan bersifat tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dalam sistem (*independent variable*). Kuadran 1 merupakan *input variables/driving variables* (variabel penentu) berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor penentu keberlanjutan dalam usahatani kelapa sawit pola swadaya sebagai berikut [5].

1. **Prosedur**

Hasil penelitian menunjukan variabel prosedur menjadi faktor penentu keberlanjutan usahatani perkebunan kelapa sawit pola swadaya. Prosedur perkebunan kelapa sawit yang menjadi pedoman bagi petani kelapa sawit kedepannya untuk memperbaiki tata kelola yang memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu teknik peremajaan kelapa sawit diantaranya yaitu pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa dikarenakan saat ini petani kelapa sawit di Provinsi Riau belum memenuhi prosedur usahatani kelapa sawit yang diminta sesuai dengan PERMENTAN No. 18 Tahun 2016.

1. **Kelompok Tani**

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya [7]. Hasil wawancara dengan petani pada saat penelitian petani belum memiliki kelompok tani dalam usahataninya sehingga diharapkan untuk kedepannya petani memiliki kelompok tani karena memiliki peran penting dalam daya tawar harga yang tinggi bibandingkan dengan tidak memiliki kelompok tani.

1. **Koperasi**

Koperasi menurut **Undang-undang No. 17 tahun 2012** adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi [8]. Koperasi juga menjadi lembaga strategis petani dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan peremajaan kelapa sawit. Organisasi dan pengelolaan usahatani kelapa sawit petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada saat ini belum bergabung dalam kelompok organisasi atau koperasi sehingga mengakibatkan petani memiliki masalah keterbatasan modal untuk melakukan peremajaan menggunakan modal sendiri.

1. **Pendamping**

Keberadaan tim tenaga pendamping sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan pekebun. Tenaga pendamping dalam arti luas merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya [7]. Berdasarkan uraian tersebut, adapun pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau yaitu kegiatan pendampingan agar menjadi perhatian bagi pemerintah karena pada saat ini belum ada pendamping bagi petani kelapa sawit.

1. **Tranparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat [9]. Belum tersedia dokumen harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS dan harga pembelian TBS pekebun oleh perusahaan. Petani kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau tidak memiliki dokumen harga TBS tersebut karena tidak memiliki kontrak SPB langsung dengan pabrik. Selain itu, pekebun merasakan bahwa penetapan harga TBS tidak transparan. Walaupun penentuan harga didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian, namun pekebun tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam penentuan harga. Petani swadaya di Provinsi Riau pasif melakukan fungsi tawar meskipun mereka merasakan bahwa penentuan hargat TBS tidak adil. Struktur pasar yang monopsoni di wilayah pedesaan ini menjadikan posisi tawar pekebun lemah.

1. **Teknologi**

Peran serta dalam teknologi pertanian adalah untuk keberhasilan produktivitas usahatani yang dihasilkan. Inovasi teknologi merupakan variabel utama penentu usahatani kelapa sawit swadaya dan diyakini dapat meningkatkan produktivitas. Pada saat ini petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau belum mengadopsi teknologi yang masih sangat terbatas disebabkan lemahnya kelembagaan petani dan penggunaan benih/bibit kelapa sawit yang belum bersertifikat atau unggul dalam usahataninya (kebanyakan petani menggunakan bibit mirales dan marihat yang tidak memiliki sertifikat) sehingga mempengaruhi produktivitas petani pada saat ini masih rendah. Sesuai dengan PERMENTAN No. 18 Tahun 2016 yang mengharuskan petani menggunakan benih/bibit yang bersertifikat.

1. **Kebijakan**

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani pekebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit dapat ditempuh melalui program: peremajaan kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan petani kelapa sawit swadaya, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya, dukungan kebijakan yang berasal dari sektor lain dan kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan.

1. **Pengalaman**

Hasil penelitian menunjukan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau memiliki pengalaman usahatani rata-rata 22 tahun dengan kata lain petani sudah berpengalaman dalam usahatani kelapa sawit. Akan tetapi petani belum bisa mempersiapkan untuk peremajaan kembali dimana pada saat ini umur ekonomis kelapa sawit swadaya melewati batas. Diharapkan segera dilaksanakanya peremajaan sehingga produktivitas kelapa sawit lebih tinggi. Pada saat ini para petani terkendala modal yang besar untuk melaksanakan peremajaan kelapa sawit.

1. **Kemitraan**

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan [7]. Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa para petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau belum memiliki mitra dengan perusahaan sekitar perkebunan kelapa sawit sehingga perusahaan tidak memberikan bantuan kepada petani dalam melaksanakan peremajaan.

1. **Kepastian** **Hukum**

Belum tersedianya izin lingkungan sesuai SPPL. SPPL adalah Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang wajib dimiliki oleh petani kelapa sawit pola swadaya. Petani kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau pada saat ini belum memiliki SPPL. Mereka mengaku tidak mengetahui apa itu SPPL sehingga tidak tahu bahwa pekebun harus memiliki SPPL.

 Implikasi pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau didasarkan pada variabel faktor-faktor yang terdapat di kuadran III yaitu hasil (*output*) dari sistem. Kuadran III merupakan kuadran variabel terikat (*output variables*) yaitu kuadran yang memuat variabel variabel yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan antar variabel kuat. Variabel yang termasuk dalam kuadran III adalah bank mitra, pelayanan, sumber daya manusia dan legalitas lahan. Variabel dalam kuadran III akan menjadi sasaran akhir atau produk dari strategi pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau karena mempunyai karakteristik ketergantungan yang kuat tetapi memiliki pengaruh yang rendah terhadap variabel lain.

1. **Bank mitra**

Bank mitra termasuk dalam kuadran III karena memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki ketergantungan yang kuat terhadap variabel lain seperti permodalan bagi petani kelapa sawit swadaya, kemudahan petani dalam mengembangkan dan meningkatkan hasil usahataninya dengan mendapatkan bantuan modal dari pihak bank mitra untuk melaksanakan kegiatan peremajaan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan para petani. Hasil penelitian petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau pada saat ini terkendala pada modal yang besar untuk melaksanakan peremajaan dan hampir semua petani belum memiliki bank menjadi mitra karena petani belum memiliki kelompok tani atau koperasi. Untuk melaksanakan peremajaan petani harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Bank, tetapi para petani tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

1. **Pelayanan**

Pelayanan yang berada di kuadran III juga menunjukkan bahwa variabel pelayanan memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan antar variabel kuat terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau. Pelayanan yang dimaksud adalah pemerintah mempermudah petani dalam pengurusan perizinan usaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada saat ini petani memiliki masalah dalam pengurusan dalam izin usaha.

1. **Legalitas Lahan**

Legalitas lahan termasuk dalam kuadran III yang menunjukkan memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan antar variabel kuat terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau. Peremajaan kebun kelapa sawit diusahakan memenuhi seluruh prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO untuk kebun swadaya dan kebun plasma sehingga pengembangan kelapa sawit memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan. Hasil penelitian untuk legalitas lahan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau belum keseluruhan memiliki hak milik lahan.

1. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kemampuan SDM pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi masih sangat terbatas disebabkan lemahnya kelembagaan petani. Untuk itu pembangunan perkebunan kedepan diawali dengan membangun manusia dan masyarakat perkebunan khususnya kelembagaan petani. Pengetahuan dan keterampilan usahatani perlu dikembangkan dan menjadi sasaran dari pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau. Keterampilan petani masih rendah sehingga pemerintah daerah sedang melakukan serangkaian kegiatan pengembangan SDM peningkatan sarana dan prasarana pemasaran [10].

Berdasarkan uraian tersebut, adapun untuk pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau yaitu perlu adanya bank mitra, peningkatan pelayanan bagi petani, memiliki legalitas lahan yang dimiliki dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan usahatani.

## IV. KESIMPULAN

Atribut penentu keberlanjutan dan paling berpengaruh tinggi terhadap kinerja sistem dengan ketergantungan yang rendah terhadap keterkaitan antar faktor dalam usahatani kelapa sawit pola swadaya di Provinsi Riau yaitu terdiri atas prosedur (prosedur SOP sesuai dengan PERMENTAN No. 18 Tahun 2016), kelompok tani (pembinaan kelompok tani), koperasi (perlu adanya koperasi), pendamping (perlu adanya pendamping bagi petani), transparansi (kemudahan dalam mendapatkan informasi), teknologi (peningkatan penggunaan teknologi), kebijakan (kebijakan yang menguntungkan petani), pengalaman (pengalaman dalam berusahatani), kemitraan (perlunya mitra dengan perusahaan), dan kepastian hukum. Selanjutnya atribut penentu yang berpengaruh rendah namun memiliki ketergantungan tinggi terhadap keterkaitan antar faktor sehingga menjadi output dalam sistem yaitu bank mitra (adanya bank mitra), pelayanan (peningkatan pelayanan pemerintah kepada petani), sumber daya manusia (peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani), dan legalitas lahan (memiliki legalitas lahan sesuai dengan PERMENTAN No. 18 Tahun 2016).

Implikasi pengembangan usahatani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau didasarkan pada variabel faktor-faktor yang terdapat pada Kuadran III, adapun pengembangannya yaitu perlu adanya bank mitra bagi petani untuk mempermudahkan modal untuk melaksanakan peremajaan, pemberian pelayanan dari pemerintah kepada petani yaitu berkaitan dengan masalah perizinan dalam usahatani, petani melengkapi legalitas lahan (Surat Hak Milik/SHM) dikarenakan pada saat ini belum keseluruhan petani memiliki surat hak milik lahan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan usahatani petani kelapa sawit swadaya (Sumber Daya Manusia/SDM).

## DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jendral Perkebunan. *Statistik perkebunan Indonesia kelapa sawit 2015-2017*. Jakarta. Sekretariat Direktorat Jendral Perkebunan. 2017.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. *Data statistik perkebunan*. Riau. Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2017.
3. Daim, C. *Pengembangan kemitraan dan dukungan pendanaannya di bidang perkebunan*. Bandung: IPB. 2003.
4. Rifai, A., Hadi, S., & Qomar, N. Studi pengembangan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau. *Jurnal Sagu*. 2008; *7*(2).
5. Hardjomidjojo, H. *Metode analisis prospektif*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2002.
6. Bourgeois, R., & Jesus, F. *Participatory prospective analysis: exploring and anticipating challenges with stakeholders* (No. 1437-2016-118895). 2004.
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nomor: 18/Permentan/Kb.330/5/2016. *Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*. 2016.
8. Pemerintahan Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang pengkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 17. Jakarta. Sekretariat Negara. 2012.
9. Didjaja, M. *Transparansi pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
10. Suparwanti, W.Analisis strategi pengembangan usaha manggis melalui pendekatan participatory action research. Skripsi. Bandung Institut Pertanian Bogor; 2009.